

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024



DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KOTA BLITAR
Jl. JAWA 64 C KOTA BLITAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahNya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LkjIP sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good government*). Dengan acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2026 Kota Blitar.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih belum sempurna, menyadari keterbatasan yang ada maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, Februari 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. perumusan rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
- j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasan;
- k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP); dan
- n. pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah
- r. Pembinaan dan pengawasan usaha industri
- s. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan: dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL,MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada pada :

Misi ketiga : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
2		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan Produktivitas industri

3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
---	---	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN PERDAGANGAN

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- 4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

URUSAN PERINDUSTRIAN

- 1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 2 sasaran strategis/ kinerja utama, yaitu :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar - 1,83 %, sehingga persentase capaiannya sebesar -81,3 % dengan kategori **tidak berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 2,25 % dengan realisasi sebesar -1,83 %.

.II. Meningkatnya Produktivitas Industri

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan produktivitas industri sebesar 1,4 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 0,93 % dengan kategori **tidak berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,5 % dengan realisasi sebesar 1,4 %.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor Perindustrian dan Perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya . namun tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi.

- b. Dalam rangka pengembangan pasar rakyat yang presentatif dan menindaklanjuti penyusunan dolumen yang ada maka perlu adanya anggaran revitalisasi pasar wage.
- c. Belum ada data perdagangan berbasis digital
- d. Masih rendahnya pengembangan variasi produk, manajemen pemasaran yang belum optimal, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, dan kurang sesuai branding produk dengan pangsa pasar
- e. Karena masih adanya ijin usaha dan industri kepada industri yang sudah dikeluarkan IUI nya dan sosialisasi pelaporan di aplikasi SIINas
- f. Belum adanya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum terkait informasi industri di Kota Blitar

strategi yang harus ditingkatkan dalam menghadapi permasalahan dimasa mendatang yaitu antara lain :

- a. Tahun 2025 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi
- b. Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- e. Mengadakan kegiatan GEMPAR “ Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar “ sehingga pasar rakyat menjadi rame lagi
- f. Akan tetap mengadakan pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM fan tetap memberikan bantuan alat produksi sehingga IKM bisa lebih berkembang
- g. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI
- h. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. DASAR HUKUM	5
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	5
F. ISU-ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	11
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024	16
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2024	22
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	23
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	24
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	26
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	26
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	28
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	28
BAB IV PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. LANGKAH PERBAIKAN	29
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (terbaru)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2024	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar mempunyai tugas Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renja yang merupakan dokumen tahunan perangkat Daerah.LKJIP dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ini sebagai dokumen evaluasi kinerja tahun 2024 sekaligus sebagai evaluasi atas capaian akhir masa jabatan Walikota dan wakil Walikota (sampai dengan 2024 pada urusan Perindustrian dan Perdagangan).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ditujukan ditujukan untuk :

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerjanya.

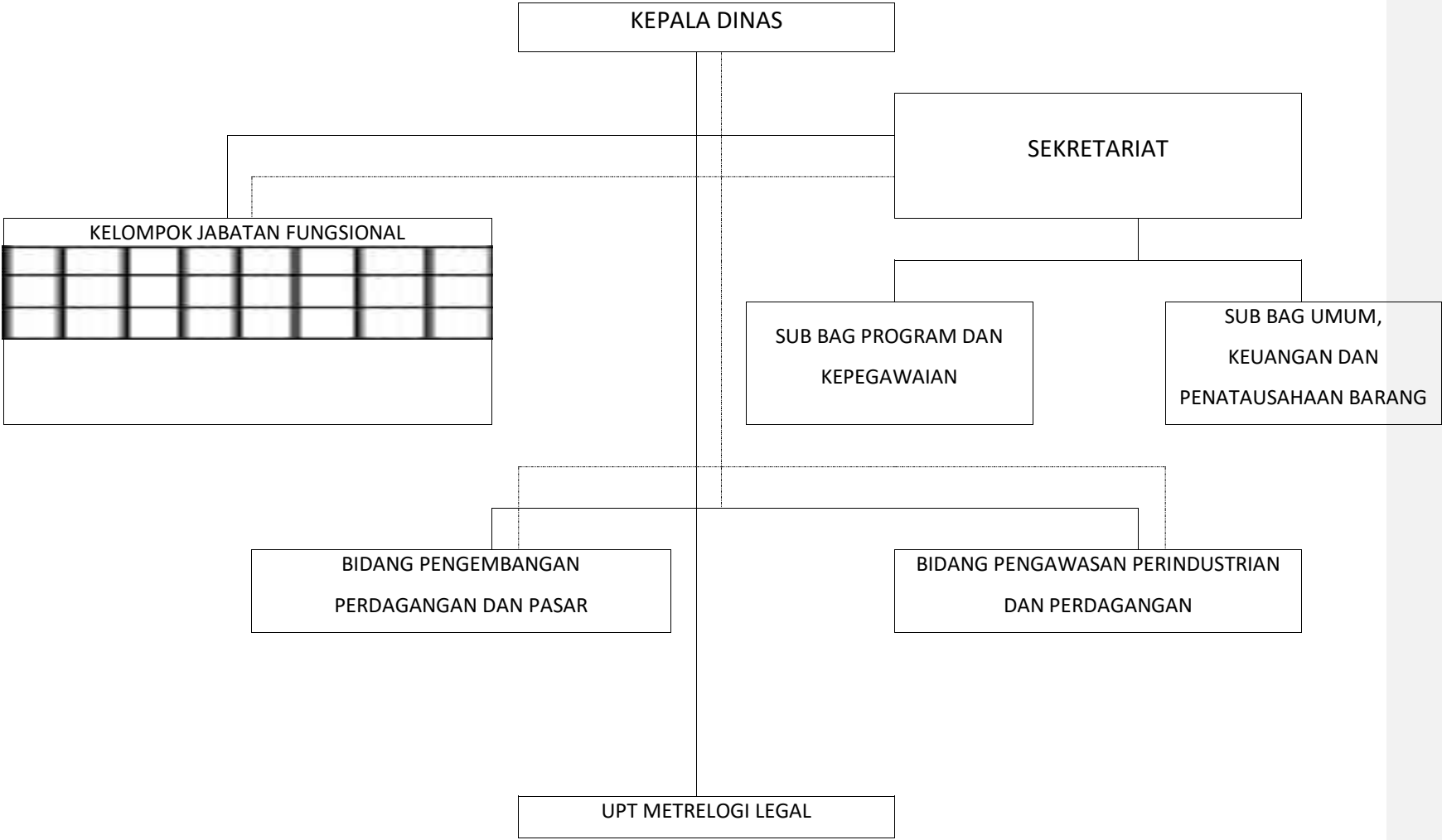
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

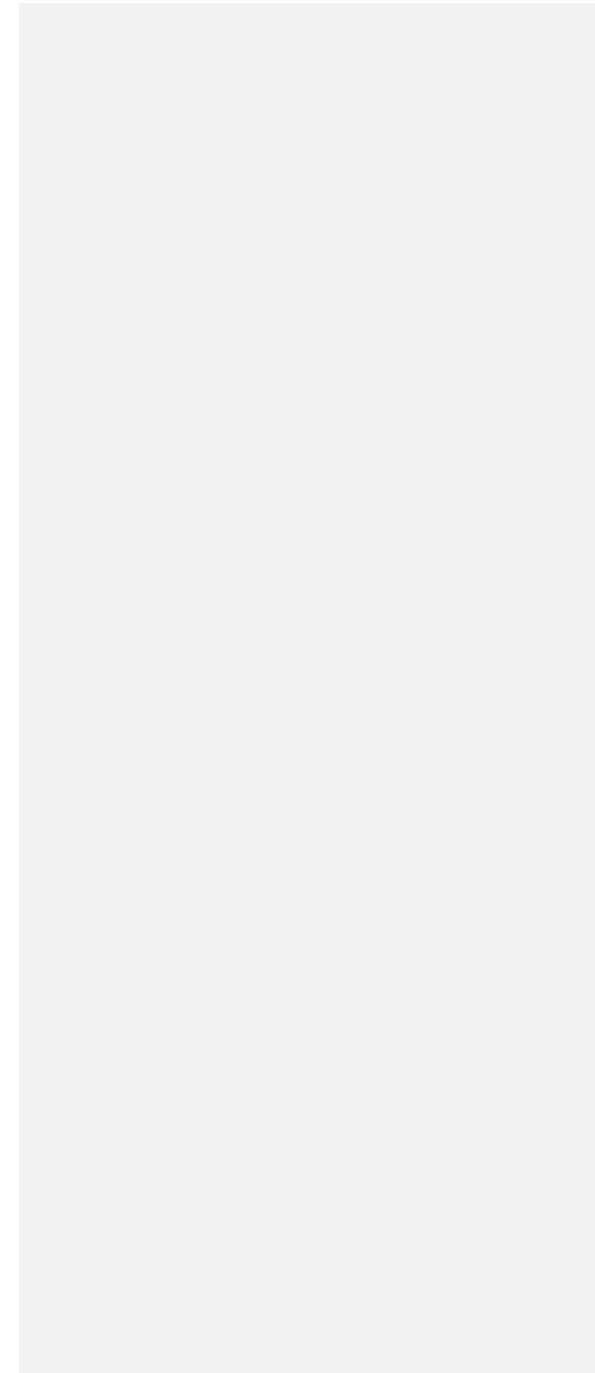
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan,evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. perumusan rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. perumusan,pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- e. perumusan,pelaksanaan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. perumusan,pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;

- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
- j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasan;
- k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP); dan
- n. pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah
- r. Pembinaan dan pengawasan usaha industri
- s. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan: dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN





C. **MAKSUD dan TUJUAN**

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar selama tahun 2024.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota No. 68 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang indicator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategi Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021- 2026;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perunahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar tahun Anggaran 2024;

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek- aspek strategis yang menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar :

- 1. Kota Blitar mempunyai 11 pasar rakyat yang dapat dimaksimalkan sebagai pusat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di Kota Blitar dan sekitarnya
- 2. Kota Blitar sebagai pusat perdagangan dan jasa. Usaha perdagangan memberikan pengaruh positif terhadap PDRB. Dengan adanya peningkatan sektor perdagangan dapat mendorong daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan perekonomian.
- 3. Banyaknya potensi industri kecil yang dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih besar

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar antara lain :

- 1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
- 2. Peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM)

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021- 2026

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada pada:

Misi ketiga : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM
1	2		3	4	5
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB		24,80	%	
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		9,83	%	
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\{(Volume\ usaha\ perdagangan\ tahun\ n - Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)) / Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	2,25	%	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	$\{(Jumlah\ produksi\ industri\ tahun\ n - Jumlah\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)) /$	1,5	%	• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

		Jumlah nilai produksi industri tahun (n-1)) x 100 %			
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun n	85,02		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- 1. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran, yang terdiri dari :
 - Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024
 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022– 2024
 - Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra
 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Daerah lain(Target SPM)
- 2. Akuntabilitas Keuangan, yang terdiri dari :
 - Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3. Prestasi/ Penghargaan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase

=

Realisasi

Rencana

x 100%

tingkat capaian

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	24,80	24,69	
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	9,83	9,91	
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	%	2,25	-1,83	-81,3
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	1,5	1,4	93,33
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85,02	86,05	104,9

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

Sesuai Perjanjian Kinerja 2024 terdapat 4 sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 4 sasaran strategis, adapun analisa dari ketiga sasaran strategis tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dalam sasaran strategis yang pertama ini diukur dengan persentase peningkatan voume usaha perdagangan, capaian indikator kinerja dapat diukur dengan

Formulasi = $\frac{((\text{Volume usaha perdagangan tahun } n - \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)) / \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1))}{1.918.063.275.206} \times 100 \%$

= $\frac{((1.882.952.096.382 - 1.918.063.275.206) / 1.918.063.275.206)}{1.918.063.275.206} \times 100 \%$

= -1,83 % (Sumber data : Disperindag Tahun 2024 Kota Blitar)

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar -1,83 %, sehingga persentase capaiannya sebesar -81,3 % dengan kategori **tidak berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 2,25 % dengan realisasi sebesar -1,83 %.

Nilai Volume usaha Perdagangan	Tahun 2023	Tahun 2024
omset	1.918.063.275.206	1.882.952.096.382

Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi.
- b. Dalam rangka pengembangan pasar rakyat yang presentatif dan menindaklanjuti penyusunan dolumen yang ada maka perlu adanya anggaran revitalisasi pasar wage.
- c. Belum ada data perdagangan berbasis digital.

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Tahun 2025 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, terutama untuk pasar legi agar mendapatkan anggaran revitalisasi.
- b. Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018.
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018.
- e. Mengadakan kegiatan GEMPAR “ Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar “

II. Meningkatkan Produktivitas Industri

Dalam sasaran strategis yang Kedua ini, capaian indikator kinerja dapat diukur dengan

formulasi = {(Jumlah produktivitas industri tahun n - Jumlah produktivitas industri tahun (n-1))/ Jumlah produktivitas industri tahun (n-1)} x 100 %

= {(844.366.054.000 – 832.708.141.000)/ 832.708.141.000 } x 100 %

= 1,4 % (Sumber data : Disdagin Tahun 2024)

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan produktivitas industri sebesar 1,4 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 0,93 % dengan kategori **tidak berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,5 % dengan realisasi sebesar 1,4 %.

Produktivitas Industri	Tahun 2023	Tahun 2024
Hasil produksi	832.708.141.000	844.366.054.000

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Masih rendahnya pengembangan variasi produk, manajemen pemasaran yang belum optimal, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, dan kurang sesuainya branding produk dengan pangsa pasar
- b. Karena masih adanya ijin usaha dan industri kepada industri yang sudah dikeluarkan IUI nya dan sosialisasi pelaporan di aplikasi SIINas
- c. Belum adanya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum terkait informasi industri di Kota Blitar

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Akan tetap mengadakan pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM fan tetap memberikan bantuan alat produksi sehingga IKM bisa lebih berkembang
- b. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI
- c. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi

Tabel. III.3. Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey Kepuasan Masyarakat	%	81	84,01	103,72
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart	%	100	100	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		perangkat daerah yang sesuai standart				
4	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah sesuai standar	%	100	100	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	100
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	100	100
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase barang penting yang diawasi	%	100	100	100
2	Keg pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	%	100	100	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	%	100	100	100
III	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	%	45	48,17	107,04
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera sah	unit	5500	4954	85,41
IV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM	%	3,5	4,25	121,43
1	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi REncana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	%	5	5	100
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	%	72	72	100
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	%	80 %	80	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	%	6	6	100

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022– 2024

Tabel. III.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,70%	25,11%	24,75%	25,03%	24,80%	24,69%
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,75%	10,1%	9,79	9,85%	9,83%	9,91 %
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	1,75%	1,85%	2%	2,22%	2,25%	-1,83%
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	0,75%	0,83%	1%	1,072%	1,5%	1,4 %
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	84,34	81	85,01	85,02	86,05

Dapat dilihat untuk IKU pertama dan kedua mengalami penurunan, yaitu penurunan volume perdagangan dan penurunan produktivitas industri. Hal ini dikarenakan deflasi merupakan penurunan harga yang dilihat tampak menguntungkan tapi memiliki dampak negative bagi perekonomian , dan iklim usaha yang kurang stabil dan daya beli masyarakat yang stagnan. Dan untuk Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah mengalami kenaikan nilai SAKIP dimana pada tahun 2023 sebesar 85,01 dan pada tahun 2024 menjadi 86,05

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tabel. III.5. Perbandingan realisasi kinerja s/d 2024 dengan target akhir renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026 (%)	CAPAIAN TAHUN 2024THD TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	2	5	6	7
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,69%	29%	4,31%
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,91 %	9,95%	0,04%
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	-1,83 %	11,5 %	9,67%
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	1,4 %	13,5 %	12,1%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,05	85,02	99,98%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan pertumbuhan usaha perdagangan tahun 2024 dengan realisasi -1,83 % bila dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami penurunan sebesar 9,67 %. Sedangkan pada kinerja Meningkatnya produktivitas industri dari target Renstra 13,5 % telah tercapai 1,4 % dan mengalami penurunan sebesar 12,1 %.Dan untuk kinerja Perangkat Daerah untuk tahun 2024 sebesar 86,05juga sudah mengalami kemajuan sebesar 99,98%.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Disperindag Kota Blitar dengan Disperindag Kota Denpasar
Tahun 2024

KOTA BLITAR				KOTA DENPASAR			
Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2,25%	-1,83 %	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan	5,20%	5,28%

KOTA BLITAR				KOTA DENPASAR			
Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	1,5%	1,4 %	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	20,00%	25,67%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat Daerah	85,02	86,05	Meningkatnya Penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi P3DN	95,00%	95,00%

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 5 (lima) program dan 14 (Sebelas) kegiatan serta mengelola anggaran sebesar Rp. 18.651.912.676,- dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti tabel di bawah ini :

Tabel III.7. Realisasi Anggaran Belanja untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.706.953.382,85	7.628.176.312	99,98
1	Perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	9.734.300	5.929.600	60,91
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.204.343.010	6.148.030.569	99,09
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	258.745.232	253.599.500	98,01
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	471.769.400	463.566.270	98,26
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.517.146,85	469.097.867	99,27
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.844.294	287.017.606	99,02
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.410.667.479.15	7.359.476.325	99,30
7	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.565.012.476,15	6.524.259.225	99,37
8	Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	863.849.750	835.217.100	96,69
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	294.261.100	288.426.889	98,01

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
9	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	192.438.600	188.473.589	97,93
10	pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	77.728.800	77.631.000	99,87
11	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.093.700	22.322.300	92,64
IV	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	161.560.400	154.067.400	95,36
12	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan	161.560.400	154.067.400	95,36
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.078.470.314	3.024.107.389	98,88
13	Penyusunan ,penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	3.078.470.314	3.024.107.389	98,88

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel III.8. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	7.866.488.979,15	42,18
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	3.078.470.314	16,50
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.706.953.382,85	41,32
JUMLAH		18.651.912.676	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 18.460.329.415 dari total anggaran sebesar Rp. 18.651.912.676 atau sebesar 98,97 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024 termasuk “sangat berhasil”.

1. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel III.9. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2,25	-1,83	-81,3	7.866.488.979,15	7.801.970.614	97,14
Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	1,5%	1,4 %	93,33	3.078.470.314	3.024.107.389	98,88
Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,02	86,05	101,21	7.448.511.993	7.408.296.042	99,46

Dari tabel diatas, Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat disimpulkan bahwa :

- Sasaran 1 : “Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan” persentase capaian kinerjanya mencapai -81,3 % dengan persentase capaian anggaran sebesar 97,14 %.
- Sasaran 2 : “Meningkatnya produktivitas industri” persentase capaian kinerjanya mencapai 93,33% dengan persentase capaian anggaran sebesar 98,88%
- Sasaran 3 : “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” persentase capaian kinerjanya mencapai 101,21% dengan persentase capaian anggaran sebesar 99,46%

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.10. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	-81,33	97,14	-0,83
Meningkatnya produktivitas ndustry	Persentase peningkatan produktivitas industri	93,33	98,88	0,94
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,21	99,46	1,75

Keterangan:

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan

1 ≥ = efisien

1 < = tidak efisien

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Untuk ke 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (Dua) sasaran semuanya tidak efisien hal ini d tunjuknya dengan nilai efisiensi yang diperoleh kurang dari 1 (satu).

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah memperoleh :

- 1. Penghargaan SAKIP Tingkat Kota Blitar peringkat 16 (Enam Belas) dengan nilai A
- 2. Juara 3 penghargaan kovablik (Jelanter) Jemput Bola
- 3. Juara 3 Penghargaan Kinaryoprojo

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2024 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan rata-rata baik. Walaupun terdapat 2 realisasi capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang tidak tercapai dikarenakan adanya deflasi dan iklim usaha yang kurang stabil juga daya beli masyarakat yang stagnan sehingga menyebabkan 2 capaian indikator sasaran di Dinas Perindutrian dan Perdagangan tidak tercapai,Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran :

1. Sasaran I

Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan

a. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan volume usaha perdagangan

Target	2,25 %
Realisasi	-1,83 %
Capaian Kinerja	- 81,3%

Selama tahun 2024 peningkatan volume usaha perdagangan terjadi penurunan sehingga target terealisasi -1,83 % dengan capaian sebesar -81,3 %. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan **tidak Berhasil**.

2. Sasaran II

Meningkatnya produktivitas industri

b. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan produktivitas industri

Target	1,5 %
--------	-------

Realisasi	1,4 %
Capaian Kinerja	0,93 %

Selama tahun 2024 peningkatan produktivitas industri juga mengalami penurunan sehingga target terrealisasi 1,4% dengan capaian kinerja sebesar 0,93 % sehingga pada sasaran ini dikategorikan **tidak Berhasil**

3. Sasaran III
- Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Target nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 85,02 realisasi 86,01 Nilai realisasi ini menunjukkan indicator kinerja sasaran **Sangat Berhasil**

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- a. Tahun 2025 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi
- b. Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mempedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018
- e. Mengadakan kegiatan GEMPAR “ Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar “ sehingga pasar rakyat menjadi rame lagi
- f. Akan tetap mengadakan pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM

- Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM fan tetap memberikan bantuan alat produksi sehingga IKM bisa lebih berkembang
- g. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI
 - h. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut

Tabel IV.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2025
1	Tahun 2025 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar legi sudah banyak yang bocor dan retak jadi perlu dilakukan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan revitalisasi pasar legi.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	√	√	√
2	Terlaksananya pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mepedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	Melaksanakan pembinaan pedagang diseluruh Pasar Rakyat atas pemanfaatan kios sesuai dengan mepedomani Perwali Nomor 46 Tahun 2018	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2025
			distribusi perdagangan			
3	Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan pemberdayaan sarana distribusi perdagangan	√	√	√
4	Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	Melaksanakan Mengevaluasi data pedagang sebagai dasar penertiban Kios dan Loss yang tidak digunakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pemberitahuan, klarifikasi, peringatan dan langkah penyegelan sesuai dengan Perwali Nomor 46 Tahun 2018	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	√	√	√
5	Mengadakan kegiatan GEMPAR “ Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar “ sehingga pasar rakyat	Melaksanakan kegiatan GEMPAR “ Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat Kota Blitar “ sehingga pasar rakyat menjadi rame lagi	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2025
	menjadi rame lagi		kerjanya - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan			
6	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM dan memberikan bantuan peralatan produksi	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM fan juga tetap memberikan bantuan peralatan produksi	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat -	√	√	√
7	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industri yang mempunyai IUI maupun industri	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2025
	sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	yang mengajukan IUI	Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			
8	Mengemban gkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	√	√	√

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta dapat mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 15 Pebruari 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar

Drs. HAKIM SISWORO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

TAHUN 2021-2026

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2020	2024				2020	2024				
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	{{(nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n – nilai PDRB sektor Perdagangan tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1}} x 100 %	23,55 %	24,80 %	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	{{(volume usaha perdagangan tahun n – volume usaha tahun (n-1))/ volume usaha tahun (n-1}} x 100 %	1,5%	2,25%	Optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana berbasis digital Optimalisasi pengawasan perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
										Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting		
											Program Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		
											Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)		
	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	{{(nilai PDRB Sektor Industri tahun n - nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1}} x 100 %	9,75 %	9,83 %	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	{{(produktivitas ndustry tahun n – produktivitas Industry tahun (n-1))/ produktivitas Industry tahun (n-1}} x 100 %	-3,17%	1,5 %	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM Peningkatan pemasaran hasil industry Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah N	A (82,8)	A (85,02)				

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2,25 %	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	72%	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	80%	7.068.446.350	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	3.187.424.520,15
										Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 unit	3.377.587.956
						Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6 %	863.849.750	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 dokumen	446.438.500
										Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola	4 dokumen	417.411.250

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Sarana Distribusi Perdagangan		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart	100 %	9.734.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	3.003.600
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	6.730.000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100%	6.204.343.010	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASaN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	6.198.984.910
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 laporan	5.358.100

Commented [M1]: Tidak ada sub kegiatan, hanya mencantumkan kegiatan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	100 %	208.752.400	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	82.650.000
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 orang	176.095.232
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100 %	471.778.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	21.627.800
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	74.308.000
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	7.577.600
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	73.987.000
										Penyediaan	Jumlah Paket	4 paket	45.350.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	6.840.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	243.519.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyedia jasa penunjang urusan sesuai standart	100 %	445.496.773	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	20.586.929
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	266.652.217,85
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	289.837.994	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	17 Unit	189.328.994

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Daerah				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	25.509.000
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 unit	75.000.000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	100%	92.438.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	92.438.600
						Pengend alian Harga, dan Stok Barang Kebutuh an Pokok dan Barang	persentase pengendalia n harga dan stok barang yg diawasi	100 %	77.728.800	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	4 laporan	77.728.800

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100%	24.100.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	24.100.000
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTPP bertanda tera sah	45%	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	Jumlah alat UTPP yang bertanda tera sah	5800 unit	170.509.938	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	65.917.500
										Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	160 orang	95.642.900
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	1,5 %	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	3,5 %	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5 %	2.478.470.314	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	3 dokumen	169.069.745

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kab/Kota				Industri	n, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
										Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 dokumen	2.825.526.569
										Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 dokumen	83.874.000

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun

: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
: 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	{(volume usaha perdagangan tahun n – volume usaha tahun (n-1))/ volume usaha tahun (n-1)} x 100 %	2,25 %	-1,83%	-81,3%		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	7.068.446.350	7.359.476.325	99,30	
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	264.277.549	222.015.770	84,01	
								Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	161.560.400	154.067.400	95,36	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	{{(produktivitas Industry tahun n – produkktivitas Industry tahun (n-1))/ produktivitas Industry tahun (n-1}} x 100 %	1,5%	1,4%	93,33%		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.417.566.166	4.368.289.494	98,88	
								Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	7.448.511.993	7.408.296.042	99,46	

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. HAKIM SISWORO,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SANTOSO,M.Pd
Jabatan : Walikota Blitar
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 2 Januari 2024

Walikota Blitar

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar

Drs. SANTOSO,M.Pd

Drs. HAKIM SISWORO,M.Si
Pembina Utama Muda
19690908 198809 1 001

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	1. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	2,80 %
		2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,83 %
2	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2,25 %
3	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan Produktivitas Industri	1,5 %
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,02

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.391.750.695	APBD
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.068.446.350	APBD
3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	194.267.400	APBD
4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	170.509.938	APBD
5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.478.470.314	APBD
JUMLAH	17.303.444.697	

Walikota Blitar

Drs. SANTOSO, M.Pd.

Blitar, 2 Januari 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar

Drs. HAKIM SISWORO, M.Si
Pembina Utama Muda
19690908 198809 1 001